



BERITA ACARA

Hasil Rapat Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Keempatbelas (RPB AMAN XIV)

Pada hari ini, Sabtu Tanggal Lima Belas, Bulan Nopember Tahun Dua Ribuh Empat Belas (15-11-2014) bertempat di Hotel Sempur Park, Bogor telah diselenggarakan Rapat Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Keempatbelas (RPB AMAN XIV) yang dihadiri oleh:

Dewan AMAN Nasional:

1. Hein Namotemo (Ketua/Utusan Region Kepulauan Maluku).
2. H. Isjaya Kaladen (Wakil Ketua/Utusan Region Sulawesi).
3. Ariana (Wakil Ketua/Utusan Region Kalimantan).
4. Yulia Awayakuane (Anggota/Utusan Region Kepulauan Maluku).
5. Ludia Mentansan (Anggota/Utusan Region Papua).
6. Alex Sanggenafa (Anggota/Utusan Region Papua).
7. Rukmini Paata Toheke (Anggota/Utusan Region Sulawesi).
8. Kamardi, SH (Anggota/Utusan Region Bali-Nusra).
9. Ambu Naptamis (Anggota/Utusan Region Kalimantan).
10. Jajang Kurniawan (Anggota/Utusan Region Jawa).
11. Alfi Syahrin (Anggota/Utusan Region Sumatera).
12. Emilia Kontesa, SH (Anggota/Utusan Region Sumatera).

Pelaksana Harian:

13. Abdon Nababan (Sekretaris Jendral AMAN).
14. Mahir Takaka (Staf khusus Sekjen AMAN).
15. Rukka Sombolinggi (Deputi II PB AMAN).
16. Arifin Saleh "Monang" sebagai (Deputi III PB AMAN).
17. Eustobio Renggi (Direktur Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, PB AMAN).
18. Rainny Natalia Sirumorang (Direktur Operasional dan Manajemen, PB AMAN).
19. Firdaus Cahyadi (Direktur INFOKOM, PB AMAN).
20. Erasmus Cahyadi (Direktur Advokasi, Hukum dan HAM, PB AMAN).
21. Lesus Rahmat (Manager Keuangan, PB AMAN).

Organisasi Sayap Dan Badan Otonom:

22. Simon Pabaras (Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara).
23. Romba' Marannu (Ketua Dewan Nasional Perempuan AMAN).
24. Silvia (Sekretaris Pelaksana Perempuan AMAN).
25. Kasmita Widodo (Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat).
26. Mualimin Pardi Dahlan, SH (Ketua Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara).

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Laporan Perkembangan Organisasi dan Program Kerja AMAN periode Mei - Oktober 2014 yang disampaikan oleh Sekjen AMAN.
2. Pandangan umum dari Dewan AMAN Nasional terhadap Laporan Perkembangan Organisasi dan Program Kerja AMAN Mei - Oktober 2014 yang disampaikan oleh Sekjen AMAN.

3. Laporan Pemantauan dan Pengawasan Organisasi dimasing-masing region yang disampaikan oleh Dewan AMAN Nasional.
4. Hasil diskusi terhadap isu-isu strategis yang melibatkan seluruh peserta selama RPB AMAN XIV berlangsung.
5. Hasil Sidang Komisi tentang Pembahasan Agenda Kerja Prioritas PB AMAN untuk Periode Nopember - April 2014.
6. Hasil pembahasan dan penetapan anggota AMAN yang baru dan pencabutan status keanggotaan AMAN yang lama.

MENYIMPULKAN:

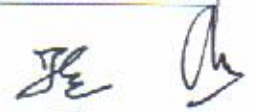
PERTAMA	:	Bahwa waktu 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kepemimpinan Sekjen AMAN telah banyak capaian yang telah dihasilkan mulai dari pembenahan organisasi, kerja-kerja advokasi, politik, penguatan organisasi sayap dan badan otonom AMAN hingga penambahan personil untuk mendukung percepatan pencapaian visi-misi AMAN.
KEDUA	:	Bahwa dengan terakomodirnya agenda-agenda strategis Masyarakat Adat dalam Visi-Misi dan Program Aksi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, AMAN harus memperjuangkan teragendakannya isu-isu dan perjuangan masyarakat adat nusantara didalam platform agenda prioritas oleh Kabijet Kerja Periode: 2014-2019.
KETIGA	:	Bahwa peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar (PB) bersama Pengurus Wilayah (PW) AMAN terhadap Pengurus Daerah (PD), Kader dan Anggota AMAN dipandang: <ul style="list-style-type: none"> - Merupakan tindakan yang sudah sejalan dengan agenda organisasi sesuai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMAN. - Bahwa alokasi dukungan baik dalam bentuk dana maupun asistensi teknis yang dilakukan oleh PB AMAN sudah saatnya memprioritaskan peningkatan kapasitas PD, Kader dan Anggota AMAN.
KEEMPAT	:	PPMAN harus dipastikan menjadi garda terdepan untuk melakukan gugatan terhadap perusahaan-perusahaan berskala besar yang telah terbukti mengusur hak-hak Masyarakat Adat.
KELIMA	:	Bahwa perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 adalah merupakan momentum yang penting untuk dijadikan sebagai arena belajar, refleksi dan evaluasi untuk menjadi penguatan kerja-kerja politik AMAN kedepan.

MENYEPAKATI:

PERTAMA	:	Agenda prioritas PB AMAN 6 (bulan) kedepan untuk masing-masing Deputi, Direktorat, Organisasi Sayap dan Badan Otonom (Rencana Kerja Terlampir).
KEDUA	:	Tambahan anggota AMAN yang baru sebanyak 16 (Enam Belas) Komunitas dan mencabut status keanggotaan AMAN sebanyak 2 (Dua) komunitas (daftar terlampir) sehingga total Anggota AMAN, 15 Nopember 2014 menjadi 2.244 (Dua Ribuh Dua Ratus Empat Puluh Empat) komunitas.



KETIGA	: Pergantian antar waktu Anggota DAMANNAS yang terpilih di KMAN IV dari Bapak Muhtarom Sumakerti ke Ibu Minatun Adawiyah (Komunitas Kampung Dukuh) sebagai DAMANNAS utusan perempuan adat dari Region Jawa yang sudah diputuskan pada RPB AMAN Ke XIII perlu dibahas ulang dalam konsolidasi anggota AMAN Region Jawa sehingga mendapatkan legitimasi dari semua Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Anggota AMAN dari Region Jawa.
KEEMPAT	: Terus melakukan pengawalan dan audiensi dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja untuk memastikan isu-isu Masyarakat Adat yang sudah tertuang dalam Visi-Misi dan Agenda Aksi Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2014 tentang komitmennya untuk memajukan pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat teragendakan dalam Program Prioritas 100 hari, 1 (satu) Tahun, 3 (tiga) Tahun dan 5 (lima) Tahun serta terimplementasi dengan baik.
KELIMA	: Melakukan review terhadap proses-proses perjuangan AMAN dalam memperjuangkan pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (RUUPHIMA) menjadi Undang-Undang dan menjadi agenda prioritas dalam PROLEGNAS 2015.
KEENAM	: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 harus dipastikan menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah (Perda) dan keutusan kepala daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat.
KETUJUH	: Pengawalan implementasi Prakarsa Nasional untuk Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat melalui REDD+ oleh 9 (sembilan) Kementerian dan Lembaga Negara.
KEDELAPAN	: Konsolidasi Anggota AMAN yang dilakukan harus dilakukan penegasan bahwa Masyarakat Adat yang menjadi Anggota AMAN adalah Masyarakat Adat yang memiliki agenda untuk berjuang bersama-sama dengan AMAN dengan melakukan review ulang format calon anggota AMAN yang memudahkan bagi Masyarakat Adat untuk memenuhi data dan informasi yang diperlukan oleh AMAN.
KESEMBILAN	: Melakukan mobilisasi dukungan data-data Masyarakat Adat ke Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat.
KESEPULUH	: Bahwa gagasan untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Masyarakat Adat menjadi salah satu agenda prioritas AMAN untuk 6 (enam) bulan kedepan.
KESEBELAS	: Bahwa laporan Perkembangan dan Pelaksanaan Program AMAN oleh Sekjen AMAN harus dikirim ke DAMANNAS selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum RPB dilaksanakan.
KEDUABELAS	: Bahwa setiap pergantian dan pengangkatan Staf PB AMAN yang dilakukan oleh Sekjen AMAN perlu dikomunikasikan dengan DAMANNAS dan SK Pengangkatannya ditembuskan ke DAMANNAS.



MEREKOMENDASIKAN:

PERTAMA	:	Bahwa penyelenggaraan RAKERNAS AMAN di Papua yang tinggal empat bulan kedepan sehingga perlu secepatnya untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan audiensi dengan Pemda terkait di Papua.
KEDUA	:	Percepatan pemetaan dan registrasi wilayah adat.
KETIGA	:	PB AMAN memfasilitasi Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) untuk menjadi lembaga yang otonom dan memiliki Badan Hukum sendiri.
KEEMPAT	:	Diperlukan ada hasil kajian terhadap Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 sebagai upaya untuk memperkuat agenda perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat.
KELIMA	:	Nomenklatur PB AMAN yang diwajibkan untuk menyesuaikan nomenklatur di PW dan PD AMAN masing-masing adalah; Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, Informasi dan Komunikasi, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Advokasi dan Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatif.
KEENAM	:	PB AMAN secepatnya memfasilitasi MUSWILUB AMAN Jawa Barat dan MUSWIL AMAN di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Papua.
KETUJUH	:	Dalam rapat-rapat AMAN (RPB, RAKERNAS), Sekjen AMAN harus memberikan penugasan terhadap Staf PB AMAN yang salah satu tugas adalah melakukan pendalaman isu-isu yang berkembang di masing-masing region.
KEDELAPAN	:	PB AMAN perlu mengeluarkan panduan penggunaan dana bagi Pengurus AMAN dan panduan dukungan pendanaan untuk PW dan PD.
KESEMBILAN	:	Data profile Anggota AMAN harus terus diupdate dan menjadi agenda prioritas di PB, PW dan PD AMAN sehingga bisa memenuhi informasi yang diperlukan sebagai Calon Anggota AMAN dan Registrasi di BRWA.
KESEPULUH	:	Gaung AMAN sudah saatnya untuk dikembangkan menjadi majalah mingguan atau koran harian.
KESEBELAS	:	PB AMAN perlu merespon dinamika dan perkembangan organisasi di Sulawesi Utara terutama hasil-hasil MUSDA dan rencana pembentukan PW AMAN BOLMONG.
KEDUABELAS	:	Untuk Partisipasi Politik Masyarakat Adat dalam PILKADA 2015, agar Sekjen AMAN segera menerbitkan Surat Edaran yang selanjutnya disosialisasikan dan dikonsolidasikan oleh DAMANNAS untuk dilaksanakan oleh PW, PD dan Anggota AMAN.

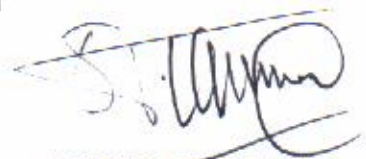
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hotel Sempur Park Bogor, 15 Nopember 2014

PIMPINAN RAPAT



HEIN NAMOTEMO
Ketua Dewan AMAN Nasional



ABDON NABABAN
Sekretaris Jendral AMAN